BAB IV

KESIMPULAN

Dari evaluasi yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penulis menyimpulkan serta memberikan beberapa saran terkait studi ini sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam pernikahan lintas budaya, kepemilikan tanah dalam bentuk kepemilikan tidak bisa dikuasai apabila tak ada sebuah kesepakatan resmi yang membagi harta. Perjanjian ini harus disetujui oleh kedua pihak untuk mencegah terjadinya pencampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan campuran tersebut.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Denpasar dalam Putusan Nomor 258/Pdt.G/2019/PA.Dps menerangkan bahwa kedudukan harta bersama dalam perkawinan lintas budaya berdasarkan hukum di Indonesia pada pasal 35 ayat (1) dan KUHPer mengenai harta bersama diatur dalam pasal 119. Pada dasarnya putusan ini merupakan putusan yang sudah kuat dimana harta berupa tanah dan bangunan bukanlah suatu harta bersama dalam sebuah perkawinan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena hal tersebut Hakim Pengadilan Agama Denpasar menyatakan bahwa objek harta bukan merupakan harta bersama perkawinan karena tidak sesuai dengan fakta hukum. Dan sejalan dengan yang telah dijelaskan diatas bahwa Warga Negara Asing dalam hal ini

adalah Mantan istri (Tergugat) tidak berhak memiliki aset tanah dan bangunan di wilayah Indonesia sehingga secara administratif kedudukan atas tanah tersebut merupakan hak Mantan suami (Penggugat) yang tercantum dalam akta dan berkewarganegaraan Indonesia. Gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum, berkaitan dengan objek sengketa yang merupakan objek sengketa yang melanggar aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa objek yang disengketakan tidak memenuhi syarat sempurna untuk menjadi sebuah objek sengketa itu sendiri sebab tidak adanya perjanjian perkawinan dan terjadinya percampuran harta antara WNA dan WNI terhadap hak milik atas sebidang tanah tersebut secara mutlak ditegaskan wajib dikembalikan atau dilepaskan haknya atas tanah tersebut kembali kepada negara.

B. Saran

1. Agar menghindari masalah yang sering muncul terutama terkait dengan kepemilikan harta, sebaiknya WNI yang berencana menikah dengan WNA mencari informasi dan memahami peraturan yang berlaku. Para pihak yang akan menikah perlu mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pranikah, bagi WNI yang menikah dengan pasangan dari negara lain, sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menjaga hak-hak mereka, termasuk hak atas kepemilikan tanah yang dilindungi oleh peraturan hukum. Selain itu, perjanjian pranikah dalam perkawinan campuran juga memberikan opsi untuk menentukan hukum yang akan mengatur pembagian harta jika terjadi perceraian.

2. Kepada para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan menangani berkas perkara hendaknya terlebih dahulu menganalisa kenyataan hukum yang terjadi dengan regulasi hukum yang tercantum dalam suatu undang-undang untuk lebih mempertimbangkan keseimbangan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam pengabulan permohonan pembagian harta gono-gini dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat alternatif maupun kumulatif yang sesuai dengan aturan yang berlaku